



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.408873/2020**



DS:2123-3037-0917-8680

**Revisi ke 05**

Tanggal : 16 Juli 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI               |
| 2. Unit Organisasi            | : (03)     | DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM                           |
| 3. Provinsi                   | : (22)     | BALI   |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408873) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR                |
| Sebesar                       | : Rp.      | 3.021.000.000 ( TIGA MILIAR DUA PULUH SATU JUTA RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum	Rp.	3.021.000.000
013.03.07.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	3.021.000.000

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |               |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 0             | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |               | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 3.021.000.000 | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0             | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
|                               |     |               | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                  |           |               |
|------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN DENPASAR | (037) Rp. | 3.021.000.000 |
|------------------|-----------|---------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2123-3037-0917-8680

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408873) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : NI PUTU ASRIYANI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			3.021.000.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			3.021.000.000
2 Program	013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum			3.021.000.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum			
	02	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan Tepat Sasaran			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase penyelesaian layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum	82 %	Persentase	
	01	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	82 %	Persentase	
Output Program	01	Permohonan Layanan Administrasi Hukum Umum yang diselesaikan tepat waktu dan berkepastian Hukum			
Indikator Output Program	01	Jumlah Penyelesaian Permohonan Layanan Administrasi Hukum Umum yang tepat waktu dan berkepastian Hukum	7.133.611	Dokumen	
Kegiatan	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			3.021.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah			
	01	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum			
	01	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah			
	01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah			
	01	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum			
	01	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah			
Output Kegiatan	5251.001	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	3 Laporan		1.978.240.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Layanan Administasi Hukum Umum di Kantor Wilayah	99	Laporan	
Output Kegiatan	5251.002	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	3 Dokumen Tindak Lanjut Pengaduan		1.042.760.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris	99	Laporan	

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

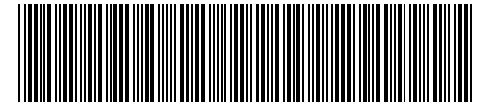
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2020**

**I B. SUMBER DANA**



DS:2123-3037-0917-8680

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
 Provinsi : (22) BALI  
 Kode>Nama Satker : (408873) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

		Rp.	3.021.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2020					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni			0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB			3.021.000.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri			0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung			0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS			0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2123-3037-0917-8680

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408873) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
408873	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	3.021.000	-	-	-	3.021.000		
013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum	-	3.021.000	-	-	-	3.021.000		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	3.021.000	-	-	-	3.021.000		
5251.001	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	-	1.978.240	-	-	-	1.978.240	22 . 00	
04	PNBP	-	1.978.240	-	-	-	1.978.240	037	
5251.002	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	-	1.042.760	-	-	-	1.042.760	22 . 00	
04	PNBP	-	1.042.760	-	-	-	1.042.760	037	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>3.021.000</b>	-	-	-	<b>3.021.000</b>		

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2123-3037-0917-8680

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408873) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

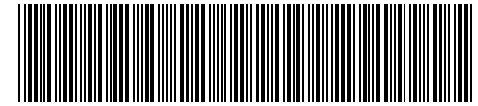
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408873	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	211.410	740.440	142.167	56.095	416.036	324.674	323.925	291.078	235.465	137.957	141.753	3.021.000
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	211.410	740.440	142.167	56.095	416.036	324.674	323.925	291.078	235.465	137.957	141.753	3.021.000
	013.03.07.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	211.410	740.440	142.167	56.095	416.036	324.674	323.925	291.078	235.465	137.957	141.753	3.021.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	211.410	740.440	142.167	56.095	416.036	324.674	323.925	291.078	235.465	137.957	141.753	3.021.000

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:2123-3037-0917-8680

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [03] DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408873] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

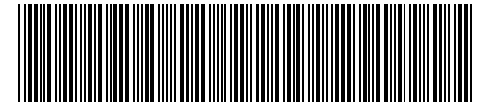
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:2123-3037-0917-8680

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [03] DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408873] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

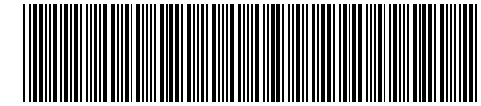
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.408880/2020**



DS:9165-4556-2148-3845

**Revisi ke 03**

Tanggal : 15 Juli 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI                              |
| 2. Unit Organisasi            | : (11)     | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia           |
| 3. Provinsi                   | : (22)     | BALI  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408880) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR                               |
| Sebesar                       | : Rp.      | 57.162.000 ( LIMA PULUH TUJUH JUTA SERATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM  
013.11.04.5248 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	57.162.000
Rp.	57.162.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |            |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 57.162.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        |     |            | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0          | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |            | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0          | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0          | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0          | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                  |           |            |
|------------------|-----------|------------|
| 1. KPPN DENPASAR | (037) Rp. | 57.162.000 |
|------------------|-----------|------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9165-4556-2148-3845

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408880) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : KOMANG LESTARI ARTHA  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			57.162.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			57.162.000
2 Program	013.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM			57.162.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	60	%	
Output Program	01	Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
Indikator Output Program	01	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	60	%	
Kegiatan	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			57.162.000
Sasaran Kegiatan	01	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
	02	Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
	01	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah			
Output Kegiatan	5248.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1	Layanan	57.162.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	60	%	
	02	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1	Buku	

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.

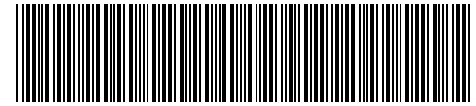
Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si  
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2020**

**I B. SUMBER DANA**



DS:9165-4556-2148-3845

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Provinsi : (22) BALI  
 Kode>Nama Satker : (408880) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	57.162.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	57.162.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9165-4556-2148-3845

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408880) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408880	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	57.162	-	-	-	57.162		
013.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	-	57.162	-	-	-	57.162		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	57.162	-	-	-	57.162		
5248.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	-	57.162	-	-	-	57.162	22 . 51	
01	RM	-	57.162	-	-	-	57.162	037	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>57.162</b>	-	-	-	<b>57.162</b>		

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.  
Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si  
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9165-4556-2148-3845

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408880) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408880	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	4.874	5.660	0	0	14.100	15.113	13.115	4.300	0	0	0	57.162
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	4.874	5.660	0	0	14.100	15.113	13.115	4.300	0	0	0	57.162
	013.11.04.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	0	4.874	5.660	0	0	14.100	15.113	13.115	4.300	0	0	0	57.162
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	4.874	5.660	0	0	14.100	15.113	13.115	4.300	0	0	0	57.162

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.  
Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si  
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:9165-4556-2148-3845

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408880] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.  
Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si  
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:9165-4556-2148-3845

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408880] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

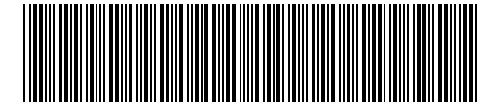
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.  
Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si  
NIP 196207021987032001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408879/2020**



DS:0802-0263-9842-4870

**Revisi ke 06**

Tanggal : 24 September 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (013)	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi	: (10)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3. Provinsi	: (22)	BALI
4. Kode>Nama Satker	: (408879)	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Sebesar	: Rp.	796.158.000 ( TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA SERATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional  
013.10.12.5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 796.158.000  
Rp. 796.158.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	796.158.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 796.158.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0802-0263-9842-4870

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

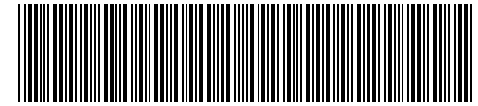
Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : NI LUH EKA HERNAYANI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			796.158.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			796.158.000
2 Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional			796.158.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum			
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	JDIH	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
Output Program	01	Pembinaan Hukum Nasional			
Indikator Output Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	Anggota	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
	06	Layanan Internal Eselon I	1	Layanan	
Kegiatan	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			796.158.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi			
	03	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah			
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah			
	05	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah			
	06	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN			
	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin			



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0802-0263-9842-4870

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : NI LUH EKA HERNAYANI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	85 Orang		387.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	5.699,00	Orang	
Output Kegiatan	5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	4 Kegiatan		23.880.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	758,00	Kegiatan	
Output Kegiatan	5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1 Kantor Wilayah		58.336.000
Indikator Output Kegiatan	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		160.000.000
Indikator Output Kegiatan	04	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		83.471.000
Indikator Output Kegiatan	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah		83.471.000
Indikator Output Kegiatan	06	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	33	Kantor Wilayah	

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2020**

**I B. SUMBER DANA**



DS:0802-0263-9842-4870

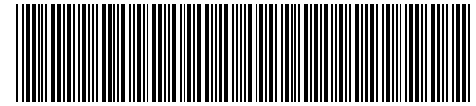
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 Provinsi : (22) BALI  
 Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

				Pagu			Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	796.158.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	796.158.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



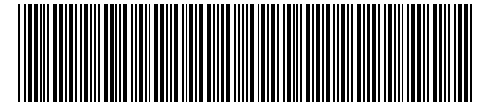
DS:0802-0263-9842-4870

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408879	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	796.158	-	-	-	796.158		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	-	796.158	-	-	-	796.158		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	796.158	-	-	-	796.158		
5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	-	387.000	-	-	-	387.000	22 . 51	
01	RM	-	387.000	-	-	-	387.000	037	
5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	-	23.880	-	-	-	23.880	22 . 51	
01	RM	-	23.880	-	-	-	23.880	037	
5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	58.336	-	-	-	58.336	22 . 51	
01	RM	-	58.336	-	-	-	58.336	037	
5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	-	160.000	-	-	-	160.000	22 . 51	
01	RM	-	160.000	-	-	-	160.000	037	
5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	-	83.471	-	-	-	83.471	22 . 51	
01	RM	-	83.471	-	-	-	83.471	037	
5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	-	83.471	-	-	-	83.471	22 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0802-0263-9842-4870

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	83.471	-	-	-	83.471	037	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>796.158</b>	-	-	-	<b>796.158</b>		

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0802-0263-9842-4870

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

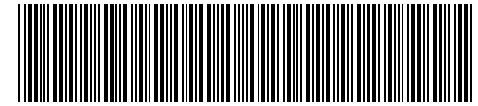
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408879	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	16.170	108.690	13.700	127.754	20.130	87.063	86.139	24.430	103.680	117.807	90.595	796.158
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	16.170	108.690	13.700	127.754	20.130	87.063	86.139	24.430	103.680	117.807	90.595	796.158
	013.10.12.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	16.170	108.690	13.700	127.754	20.130	87.063	86.139	24.430	103.680	117.807	90.595	796.158
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	16.170	108.690	13.700	127.754	20.130	87.063	86.139	24.430	103.680	117.807	90.595	796.158

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:0802-0263-9842-4870

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408879] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

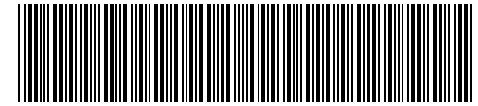
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:0802-0263-9842-4870

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408879] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

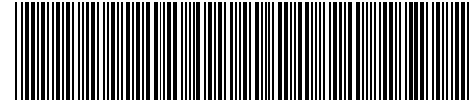
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.408878/2020**



DS:8114-6395-5067-6778

**Revisi ke 01**

Tanggal : 27 Februari 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI                                    |
| 2. Unit Organisasi            | : (09)     | DITJEN HAK ASASI MANUSIA  |
| 3. Provinsi                   | : (22)     | BALI  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408878) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR                                     |
| Sebesar                       | : Rp.      | 227.085.000 ( DUA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.11 Program Pemajuan HAM  
013.09.11.5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	227.085.000
Rp.	227.085.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |             |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 227.085.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |             | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0           | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |             | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0           | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0           | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0           | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                  |           |             |
|------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN DENPASAR | (037) Rp. | 227.085.000 |
|------------------|-----------|-------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8114-6395-5067-6778

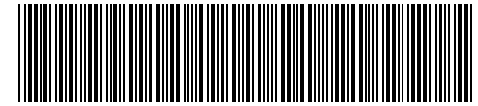
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : Sutrisno  
Bendahara Pengeluaran : KOMANG LESTARI ARTHA  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			227.085.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			227.085.000
2 Program	013.09.11	Program Pemajuan HAM			227.085.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	70	Persen	
	02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	15	Persen	
	03	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10	Persen	
	04	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	Persen	
	05	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	75	Persen	
	06	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1	Rekomendasi	
	07	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang di tindaklanjuti	60	Persen	
Output Program	01	kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			
Indikator Output Program	01	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	70	Persen	
	02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	15	Persen	
	03	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10	Persen	
	04	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	Persen	
	05	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	75	Persen	
	06	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1	Rekomendasi	
	07	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang di tindaklanjuti	60	Persen	
Kegiatan	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			227.085.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	02	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	02	jumlah kab/kota peduli HAM			
	03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM			
	01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8114-6395-5067-6778

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : Sutrisno  
Bendahara Pengeluaran : KOMANG LESTARI ARTHA  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		
	02	jumlah kab/kota peduli HAM		
	03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		
	01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		
	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		
	02	jumlah kab/kota peduli HAM		
	03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		
	01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		
	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		
	02	jumlah kab/kota peduli HAM		
	03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		
	01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		
Output Kegiatan	5255.001	Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 rekomendasi	119.785.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM	99 rekomendasi	
Output Kegiatan	5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	5 Instansi Pemerintah	107.300.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM	1 Pemerintah Daerah	
	02	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

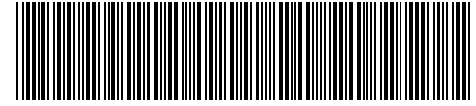
ttd.  
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH  
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2020**

**I B. SUMBER DANA**



DS:8114-6395-5067-6778

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
 Provinsi : (22) BALI  
 Kode>Nama Satker : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	227.085.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	227.085.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

Pagu

Ekuivalen Rupiah

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8114-6395-5067-6778

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
408878	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	227.085	-	-	-	227.085		
013.09.11	Program Pemajuan HAM	-	227.085	-	-	-	227.085		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	227.085	-	-	-	227.085		
5255.001	Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	119.785	-	-	-	119.785	22 . 51	
01	RM	-	119.785	-	-	-	119.785	037	
5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	107.300	-	-	-	107.300	22 . 51	
01	RM	-	107.300	-	-	-	107.300	037	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>227.085</b>	-	-	-	<b>227.085</b>		

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH  
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8114-6395-5067-6778

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

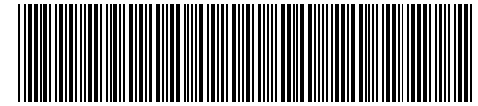
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408878	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	13.860	34.515	15.600	4.700	27.362	34.122	21.490	21.235	14.290	10.850	29.061	227.085
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	13.860	34.515	15.600	4.700	27.362	34.122	21.490	21.235	14.290	10.850	29.061	227.085
013.09.11.5255		Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	0	13.860	34.515	15.600	4.700	27.362	34.122	21.490	21.235	14.290	10.850	29.061	227.085
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	13.860	34.515	15.600	4.700	27.362	34.122	21.490	21.235	14.290	10.850	29.061	227.085

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH  
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:8114-6395-5067-6778

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408878] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

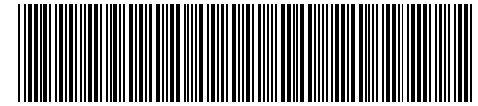
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH  
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:8114-6395-5067-6778

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408878] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

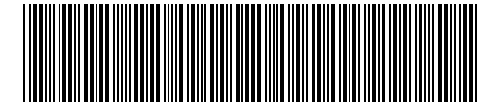
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH  
NIP 196211211982031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.408875/2020**



DS:7030-3944-3209-1980

**Revisi ke 03**

Tanggal : 21 September 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI   |
| 2. Unit Organisasi            | : (06)     | DITJEN IMIGRASI  |
| 3. Provinsi                   | : (22)     | BALI   |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408875) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 1.221.395.000 ( SATU MILIAR DUA RATUS DUA PULUH SATU JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 013.06.10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian  
013.06.10.5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	1.221.395.000
Rp.	1.221.395.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |               |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 0             | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |               | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 1.221.395.000 | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |               | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0             | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 1.221.395.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:7030-3944-3209-1980

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408875) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : NI MADE KRISNASARI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			1.221.395.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			1.221.395.000
2 Program	013.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			1.221.395.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian			
	02	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian			
Indikator Kinerja Program	01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7,3	Indeks	
	01	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	Persen	
Output Program	01	Pelayanan Keimigrasian			
Indikator Output Program	01	Jumlah Pelayanan Kegiatan yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	38400200	Layanan	
Kegiatan	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			1.221.395.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			
	02	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian			
	03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian			
	04	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi			
	05	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker			
	06	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
	07	Terselenggaranya Layanan Perkantoran			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian			
	01	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian			
	01	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian			
	01	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan			
	01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker			
	01	Jumlah Layanan Internal Overhead			
	01	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5254.016	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	16 Kegiatan		867.219.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	792	Kegiatan	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:7030-3944-3209-1980

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408875) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : NI MADE KRISNASARI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.2

---

Output Kegiatan	5254.017	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	14 LHK		354.176.000
Indikator Output Kegiatan	01	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	2,5	Indeks	

---

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Imigrasi

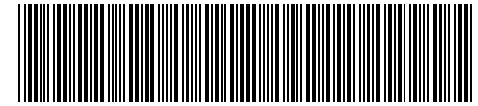
ttd.  
Jhoni Ginting, S.H., M.H.  
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2020**

**I B. SUMBER DANA**



DS:7030-3944-3209-1980

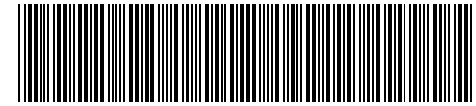
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
 Provinsi : (22) BALI  
 Kode>Nama Satker : (408875) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	1.221.395.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	1.221.395.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7030-3944-3209-1980

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408875) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408875	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	1.221.395	-	-	-	1.221.395		
013.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	-	1.221.395	-	-	-	1.221.395		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	1.221.395	-	-	-	1.221.395		
5254.016	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	-	867.219	-	-	-	867.219	22 . 51	
04	PNBP	-	867.219	-	-	-	867.219	037	
5254.017	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	-	354.176	-	-	-	354.176	22 . 51	
04	PNBP	-	354.176	-	-	-	354.176	037	
<b>JUMLAH</b>		-	1.221.395	-	-	-	1.221.395		

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Jhoni Ginting, S.H., M.H.  
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7030-3944-3209-1980

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408875) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

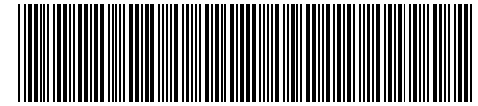
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408875	<b>KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	7.426	36.467	161.445	0	229.573	125.150	35.248	134.970	255.206	192.528	43.382	1.221.395
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	7.426	36.467	161.445	0	229.573	125.150	35.248	134.970	255.206	192.528	43.382	1.221.395
	013.06.10.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	0	7.426	36.467	161.445	0	229.573	125.150	35.248	134.970	255.206	192.528	43.382	1.221.395
		<b>52 BELANJA BARANG DAN BARANG</b>	0	7.426	36.467	161.445	0	229.573	125.150	35.248	134.970	255.206	192.528	43.382	1.221.395

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Jhoni Ginting, S.H., M.H.  
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:7030-3944-3209-1980

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [06] DITJEN IMIGRASI  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408875] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

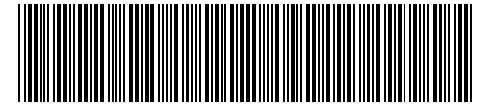
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Jhoni Ginting, S.H., M.H.  
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:7030-3944-3209-1980

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [06] DITJEN IMIGRASI  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408875] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

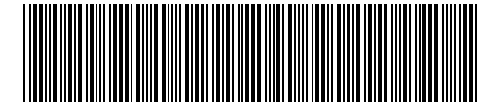
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Jhoni Ginting, S.H., M.H.  
NIP 196106121989031003



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.07.2.408876/2020**



DS:2975-6481-3574-9313

**Revisi ke 03**

Tanggal : 16 Juli 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI   |
| 2. Unit Organisasi            | : (07)     | Ditjen Kekayaan Intelektual  |
| 3. Provinsi                   | : (22)     | BALI   |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408876) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 780.915.000 ( TUJUH RATUS DELAPAN PULUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.07.09 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual  
013.07.09.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	780.915.000
Rp.	780.915.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |             |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 0           | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        |     |             | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP                          |     |             | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 780.915.000 | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0           | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0           | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0           | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                         |           |             |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN D E N P A S A R | (037) Rp. | 780.915.000 |
|-------------------------|-----------|-------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2975-6481-3574-9313

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408876) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : NI PUTU ASRIYANI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			780.915.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			780.915.000
2 Program	013.07.09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual			780.915.000
Sasaran Program	01	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia			
Indikator Kinerja Program	01	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual	2	Persentase	
	02	Persentase Peningkatan Produk KI yang dilindungi	5	Persentase	
	03	Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	5	Persentase	
Output Program	01	Layanan Kekayaan Intelektual			
Indikator Output Program	01	Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	99	%	
	02	Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	80	%	
	03	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.3	Indeks	
Kegiatan	5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			780.915.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM			
	02	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah			
	02	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah			
	01	Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah			
	02	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah			
Output Kegiatan	5253.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	50	Jumlah Permohonan	676.415.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah	4389	Permohonan	
	02	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	990	Stakeholder	
Output Kegiatan	5253.002	Penegakan Hukum Bidang KI di Wilayah	2	Lokus	104.500.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	66	Lokus	

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.  
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2020  
I B. SUMBER DANA**



DS:2975-6481-3574-9313

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408876) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	780.915.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0 Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$		0 Rp.		0
2. PNPB	Rp.	780.915.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0 Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0 Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2975-6481-3574-9313

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408876) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408876	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	780.915	-	-	-	780.915		
013.07.09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	-	780.915	-	-	-	780.915		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	780.915	-	-	-	780.915		
5253.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	676.415	-	-	-	676.415	22 . 51	
04	PNBP	-	676.415	-	-	-	676.415	037	
5253.002	Penegakan Hukum Bidang KI di Wilayah	-	104.500	-	-	-	104.500	22 . 51	
04	PNBP	-	104.500	-	-	-	104.500	037	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>780.915</b>	-	-	-	<b>780.915</b>		

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.  
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2975-6481-3574-9313

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408876) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

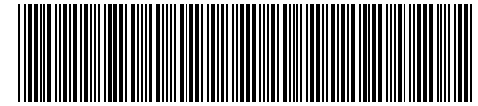
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408876	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	44.146	85.606	0	25.000	267.988	57.383	62.000	91.000	58.386	30.961	58.445	780.915
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	44.146	85.606	0	25.000	267.988	57.383	62.000	91.000	58.386	30.961	58.445	780.915
	013.07.09.5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	44.146	85.606	0	25.000	267.988	57.383	62.000	91.000	58.386	30.961	58.445	780.915
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	44.146	85.606	0	25.000	267.988	57.383	62.000	91.000	58.386	30.961	58.445	780.915

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.  
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:2975-6481-3574-9313

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408876] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

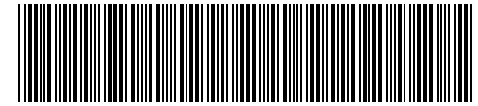
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.  
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:2975-6481-3574-9313

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408876] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

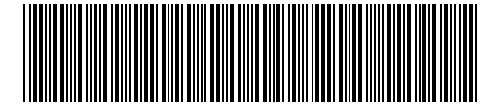
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.  
NIP 196611181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408874/2020**



DS:6294-5506-6875-3429

**Revisi ke 04**  
Tanggal : 21 September 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. Unit Organisasi            | : (05)     | DITJEN PEMASYARAKATAN   |
| 3. Provinsi                   | : (22)     | BALI  |
| 4. Kode/Nama Satker           | : (408874) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR   |
| Sebesar                       | : Rp.      | 755.123.000 ( TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan  
013.05.08.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	755.123.000
Rp.	755.123.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	755.123.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 755.123.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:6294-5506-6875-3429

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : NI MADE KRISNASARI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			755.123.000
Sub Fungsi	03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN			755.123.000
2 Program	013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan			755.123.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan			
	02	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri			
	03	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan			
Indikator Kinerja Program	01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan	90	Persen	
	01	Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan yang Berdaya Guna Setelah Bebas	15,2	Persen	
	01	Menurunnya Persentase Residivis	9,8	Persen	
Output Program	01	Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana			
Indikator Output Program	01	Persentase tahanan yang mendapatkan layanan tahanan sesuai standar	90	Persen	
	02	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan pembinaan narapidana sesuai standar	90	Persen	
	03	Persentase Narapidana/Tahanan/Anak yang mendapatkan layanan perawatan sesuai standar	90	Persen	
	04	Persentase basan baran yang dikelola sesuai standar	90	Persen	
	05	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90	Persen	
	06	Persentase Klien yang mendapatkan layanan pembimbingan klien pemasarakatan sesuai standar	90	Persen	
	07	Persentase anak yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengentasan sesuai standar	90	Persen	
Kegiatan	5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			755.123.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasarakatan di wilayah			
	02	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar			
	03	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
	04	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar			
	05	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar			
	06	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
	07	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah sesuai standar			
	08	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar			
	09	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
	10	Layanan Perkantoran			



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:6294-5506-6875-3429

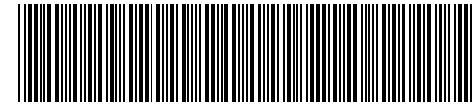
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : NI MADE KRISNASARI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.2

Sasaran Kegiatan	11	Meningkatnya Kapasitas Hunian
	12	Terselenggarannya Dukungan Layanan Manajemen Satker
Indikator Kinerja Kegiatan	07	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
	08	Jumlah Gedung/Bangunan
	01	Jumlah Layanan Perkantoran
	01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)
	02	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
	03	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)
	04	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan
	01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu
	02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar
	03	Tersediannya data pegawai pemasarakatan sesuai dengan kompetensi
	04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
	01	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar
	01	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar
	02	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar
	03	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar
	04	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi
	01	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar
	01	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar
	02	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar
	03	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar
	04	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:6294-5506-6875-3429

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : NI MADE KRISNASARI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.3

Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar			
	01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar			
	02	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar			
	03	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar			
	01	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar			
	02	Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar			
	03	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar			
	01	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar			
	02	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar			
	05	Jumlah Kendaraan Bermotor			
	06	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
Output Kegiatan	5252.003	Pembinaan UPT Pemasarakatan	14 UPT		755.123.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemsarakatan di wilayah sesuai standar	90	%	

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

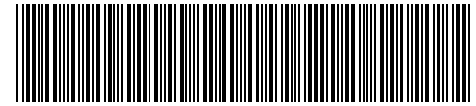
ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2020**

**I B. SUMBER DANA**



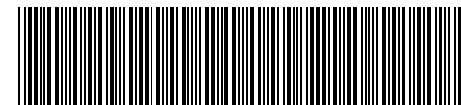
DS:6294-5506-6875-3429

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
 Provinsi : (22) BALI  
 Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

		Rp.	755.123.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2020					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	755.123.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6294-5506-6875-3429

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408874	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	755.123	-	-	-	755.123		
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakatan	-	755.123	-	-	-	755.123		
5252	Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	-	755.123	-	-	-	755.123		
5252.003	Pembinaan UPT Masyarakatan	-	755.123	-	-	-	755.123	22 . 51	
01	RM	-	755.123	-	-	-	755.123	037	
<b>JUMLAH</b>		-	755.123	-	-	-	755.123		

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Masyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6294-5506-6875-3429

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

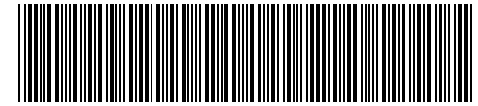
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408874	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	20.347	57.908	0	0	20.640	46.782	91.954	81.958	152.295	134.889	148.351	755.123
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	20.347	57.908	0	0	20.640	46.782	91.954	81.958	152.295	134.889	148.351	755.123
013.05.08.5252		Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	0	20.347	57.908	0	0	20.640	46.782	91.954	81.958	152.295	134.889	148.351	755.123
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	20.347	57.908	0	0	20.640	46.782	91.954	81.958	152.295	134.889	148.351	755.123

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:6294-5506-6875-3429

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408874] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

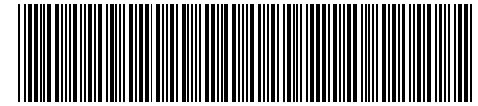
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:6294-5506-6875-3429

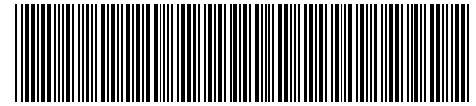
Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408874] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408877/2020**

**Revisi ke 05**

Tanggal : 29 September 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (013)	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi	: (08)	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Provinsi	: (22)	BALI
4. Kode>Nama Satker	: (408877)	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Sebesar	: Rp.	165.865.000 ( SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.06 Program Pembentukan Hukum  
013.08.06.5250 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 165.865.000  
Rp. 165.865.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	165.865.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 165.865.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3144-6788-5008-9210

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408877) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : EKA HERNAYANI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			165.865.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			165.865.000
2 Program	013.08.06	Program Pembentukan Hukum			165.865.000
Sasaran Program	01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80	%	
	02	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200	orang	
	03	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
Output Program	01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Output Program	01	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80	%	
	02	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200	orang	
	03	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
Kegiatan	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah			165.865.000
Sasaran Kegiatan	01	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah			
	02	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			
Output Kegiatan	5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	30 Raperda		145.085.000
Indikator Output Kegiatan	01	jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	719	PUU	
Output Kegiatan	5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	20 Orang		20.780.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	602	Orang	

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2020**

**I B. SUMBER DANA**



DS:3144-6788-5008-9210

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 Provinsi : (22) BALI  
 Kode>Nama Satker : (408877) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	165.865.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	165.865.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3144-6788-5008-9210

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408877) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
408877	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	165.865	-	-	-	165.865		
013.08.06	Program Pembentukan Hukum	-	165.865	-	-	-	165.865		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	-	165.865	-	-	-	165.865		
5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	-	145.085	-	-	-	145.085	22 . 51	
01	RM	-	145.085	-	-	-	145.085	037	
5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	-	20.780	-	-	-	20.780	22 . 51	
01	RM	-	20.780	-	-	-	20.780	037	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>165.865</b>	-	-	-	<b>165.865</b>		

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3144-6788-5008-9210

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408877) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

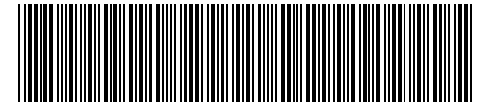
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408877	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	19.980	19.985	10.045	0	11.071	19.821	16.125	33.920	17.340	17.578	0	165.865
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	19.980	19.985	10.045	0	11.071	19.821	16.125	33.920	17.340	17.578	0	165.865
	013.08.06.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	0	19.980	19.985	10.045	0	11.071	19.821	16.125	33.920	17.340	17.578	0	165.865
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	19.980	19.985	10.045	0	11.071	19.821	16.125	33.920	17.340	17.578	0	165.865

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:3144-6788-5008-9210

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408877] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:3144-6788-5008-9210

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408877] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.01.2.408870/2020**



DS:9338-8716-4119-9183

**Revisi ke 10**  
Tanggal : 29 September 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. Unit Organisasi            | : (01)     | SEKRETARIAT JENDERAL  |
| 3. Provinsi                   | : (22)     | BALI  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408870) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR   |
| Sebesar                       | : Rp.      | 17.555.093.000 ( TUJUH BELAS MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM  
013.01.01.1558 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

	Jumlah Uang
Rp.	17.555.093.000
Rp.	17.555.093.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |                |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 17.555.093.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |                | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0              | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |                | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0              | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0              | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0              | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                  |           |                |
|------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN DENPASAR | (037) Rp. | 17.555.093.000 |
|------------------|-----------|----------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9338-8716-4119-9183

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

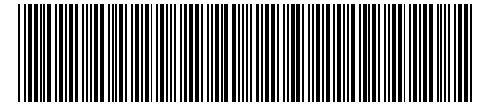
Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : NYOMAN SUARMITA  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			17.555.093.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			17.555.093.000
2 Program	013.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM			17.555.093.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM			
Indikator Kinerja Program	01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,1	indeks	
	02	Nilai Reformasi Birokrasi	85	Nilai RB	
	03	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85	Nilai LAKIP	
Output Program	01	Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM			
Indikator Output Program	01	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kementerian Hukum dan HAM	7,1	indeks	
Kegiatan	1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			17.555.093.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.			
	02	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.			
	03	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel			
	04	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan			
	05	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel.			
	06	Jumlah Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar			
	07	Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan			
Output Kegiatan	1558.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		1.864.417.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	1	unit	
	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	1	unit	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1	unit	
	04	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	1000	m2	
Output Kegiatan	1558.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan		1.636.429.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	33	Dokumen	
	02	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	33	Layanan	



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9338-8716-4119-9183

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMARULI MANIHURUK  
Bendahara Pengeluaran : NYOMAN SUARMITA  
Pejabat Penanda Tangan SPM : FAISOL ALI

Halaman : IA.2

Indikator Output Kegiatan	03	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	33	Layanan	
	04	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	33	Layanan	
	05	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	33	Layanan	
	06	Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat	33	Layanan	
Output Kegiatan	1558.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		14.054.247.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	

Jakarta, 12 November 2019  
Sekretaris Jenderal

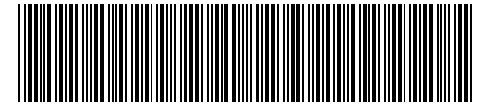
ttd.  
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO  
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2020**

**I B. SUMBER DANA**



DS:9338-8716-4119-9183

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
 Provinsi : (22) BALI  
 Kode>Nama Satker : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	17.555.093.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	17.555.093.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9338-8716-4119-9183

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408870	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	10.478.322	5.212.354	1.864.417	-	-	17.555.093		
013.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	10.478.322	5.212.354	1.864.417	-	-	17.555.093		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	10.478.322	5.212.354	1.864.417	-	-	17.555.093		
1558.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	1.864.417	-	-	1.864.417	22 . 51	
01	RM	-	-	1.864.417	-	-	1.864.417	037	
1558.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	-	1.636.429	-	-	-	1.636.429	22 . 51	
01	RM	-	1.636.429	-	-	-	1.636.429	037	
1558.994	Layanan Perkantoran	10.478.322	3.575.925	-	-	-	14.054.247	22 . 51	
01	RM	10.478.322	3.575.925	-	-	-	14.054.247	037	
<b>JUMLAH</b>		<b>10.478.322</b>	<b>5.212.354</b>	<b>1.864.417</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.555.093</b>		

Jakarta, 12 November 2019  
Sekretaris Jenderal

ttd.  
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO  
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9338-8716-4119-9183

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

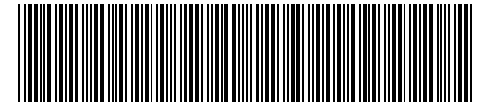
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408870	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	1.343.578	1.274.306	974.185	994.163	1.569.951	909.740	1.198.498	1.722.961	1.654.042	1.974.353	1.864.001	2.075.314	17.555.093
		51 BELANJA PEGAWAI	632.681	752.449	736.690	740.446	1.388.025	740.446	833.084	1.415.425	833.084	833.084	833.084	739.821	10.478.322
		52 BELANJA BARANG	710.897	521.857	237.495	203.187	169.294	169.294	274.834	193.357	616.423	625.035	631.520	859.162	5.212.354
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	50.530	12.632	0	90.580	114.179	204.534	516.233	399.397	476.332	1.864.417
	013.01.01.1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1.343.578	1.274.306	974.185	994.163	1.569.951	909.740	1.198.498	1.722.961	1.654.042	1.974.353	1.864.001	2.075.314	17.555.093
		51 BELANJA PEGAWAI	632.681	752.449	736.690	740.446	1.388.025	740.446	833.084	1.415.425	833.084	833.084	833.084	739.821	10.478.322
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	710.897	521.857	237.495	203.187	169.294	169.294	274.834	193.357	616.423	625.035	631.520	859.162	5.212.354
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	50.530	12.632	0	90.580	114.179	204.534	516.233	399.397	476.332	1.864.417

Jakarta, 12 November 2019  
Sekretaris Jenderal

ttd.  
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO  
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:9338-8716-4119-9183

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408870] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

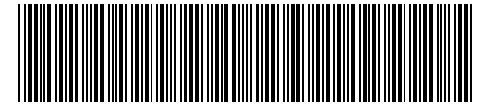
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Sekretaris Jenderal

ttd.  
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO  
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:9338-8716-4119-9183

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [408870] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
408870	<b>KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR</b>		
013.01.01	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM</b>		
1558	<b>Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</b>		
1558.951	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b> Rp. 1.531.059		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Pembangunan Pos Jaga 1 Unit, Pengembangan Ruang Pelayanan 36 M2, Penataan Halaman 800 M2. Rp. 560.050		
	* Rehab 3 Unit Rumah Dinas Type C 270 M2. Rp. 971.009		

Jakarta, 12 November 2019  
Sekretaris Jenderal

ttd.  
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO  
NIP 196012151988021001